

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manajemen risiko adalah proses perencanaan kegiatan yang dibuat untuk mengantisipasi terjadinya risiko oorganisasi termasuk adanya kegiatan indentifikasi, perencanaan, startegi, dan penilaian hal-hal negative yang dapat terjadi. Penerpana manajemen risiko berpijak apda konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan teriintegrasi dengan startegimanajemen. Proses atau fungsi manajemen resiko sering diterjemahkan dalam tiga Langkah yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Manajemen resiko diharapkan dapat membuat organisasi menjadi sadar resiko dan lebih berhati-hati dalam pengambilan Keputusan dengan tujuan organisasi dapat mengambil Keputusan yang tepat dan optimal bagi organisasi. Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1 Peraturan emerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajibmealakukan penilaian Risiko, sehingga Organisasi Perangkat Daerah diharapkan mampu mengidentifikasi penyimpangan atas pelaksnanaan kegiatan dibandingan dengan rencana kegiatan.

Oleh karena itu diperlukan penilaian atas resiko yang dimiliki sehingga dapat ditentukan Tindakan pencegahan dan solutif terhadap resiko yang akan hidapi sesuai denganskala penilaian risiko.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. Maksud Dan Tujuan

Kegiatan penyusunan laporan penilaian risiko tahun 2025 bertujuan sebagai implementasi fungsi komunikasi dan pemantauan oleh Pemilik Risiko dan melaporkan hal-hal yang dibutuhkan Solusi/rekomendasi kepada unit kepatuhan sebagai sarana pemilik risiko dalam mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2025 di lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan selaku pelaksana urusan desentralisasi dan Pembangunan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan pada tahun 2025 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengndalian Intern

Control Environment Evaluation (CEE)

2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	3	4	3	4	4	4	4	4	3	...	4	3	4	4	3	3	4	4	4	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	3	3	4	4	3	3	4	4	4	...	4	4	3	4	4	4	3	4	4	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	4	4	4	4	3	4	4	...	4	4	4	4	3	4	3	4	4	Memadai
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF																				Memadai
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	3	3	4	3	4	3	3	3	4	...	4	3	3	4	4	4	3	3	3	Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	4	3	3	3	4	4	3	4	...	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	3	3	3	4	3	3	3	4	...	3	3	4	4	4	4	3	4	4	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	3	4	3	4	3	4	3	4	...	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Memadai

5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	3	4	4	4	4	3	3	3	...	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasional OPD (cascading)	4	3	4	3	4	4	4	3	4	...	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	4	4	4	4	4	3	4	3	...	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	4	3	4	...	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN																					Memadai
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	4	4	3	3	3	3	3	4	3	...	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	4	4	4	4	4	3	4	...	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	4	4	3	4	4	3	3	4	...	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	Memadai

4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	4	4	4	4	4	3	4	...	4	4	4	4	4	3	4	3	4	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT																				Memadai
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	4	4	3	3	3	...	3	3	4	3	4	4	3	3	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	4	4	3	4	4	3	...	4	4	4	4	4	3	3	4	4	Memadai
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	...	4	4	3	4	4	4	3	4	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA																				Memadai
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	3	4	4	4	3	3	3	4	...	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	4	4	4	3	4	...	3	4	4	4	4	3	3	4	4	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	4	3	3	4	4	3	3	4	3	...	4	3	3	3	3	4	3	3	4	Memadai
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	4	3	4	3	4	4	4	...	4	4	3	4	3	4	3	4	4	Memadai

	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	4	3	4	4	4	3	4	...	3	4	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
5	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	3	4	4	3	4	3	3	3	...	4	4	3	4	3	4	3	4	4	Memadai
6	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	3	3	4	3	4	4	4	4	4	...	4	3	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF																				Memadai
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	4	3	3	4	4	4	4	4	3	...	4	4	4	4	3	4	4	4	4	Memadai
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	4	3	4	3	3	3	3	3	...	3	4	3	4	3	3	4	4	4	Memadai
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	3	4	4	3	4	4	4	3	4	...	3	3	3	4	3	4	3	4	4	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	...	4	4	4	4	3	4	4	4	Memadai

5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	4	3	3	3	4	3	3	3	3	...	4	4	3	3	3	4	4	4	4	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT																				Memadai
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	4	3	4	3	3	3	4	...	3	3	3	4	3	4	4	4	4	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	4	4	3	4	4	4	3	4	...	4	4	4	4	3	3	4	4	4	Memadai

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki beberapa kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai sebagaimana berikut :

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Pnyelesaian
1	Sudah terdapat kode etik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Namun perlu disesuaikan kembali dengan regulasi terbaru yakni Perbub No. 39 Tahun 2021 tentang Kode Etik	Melakukan revisi kode etik berdasarkan Perbub No. 39 Tahun 2021 dan mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai	Sekretaris Dinas / Subbag Umum & Kepegawaian	September 2025
2	Telah dilaksanakan kegiatan bimbingan teknis setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi pegawai, namun masih belum keseluruhan pegawai yang mengikuti	Menyusun perencanaan pelatihan tahunan yang menyasar seluruh pegawai secara bergiliran dan merata	Kepala Subbag Kepegawaian / Kepala Bidang	Desember 2025
3	Adanya rapat internal yang diselenggarakan secara rutin tiap awal bulan, dan telah tercipta budaya kerja yang kondusif, namun demikin masih perlu untuk terus ditingkatkan.	Menyusun pedoman budaya kerja dan memperkuat internalisasi nilai-nilai budaya kerja dalam kegiatan rutin	Sekretaris Dinas / Koordinator Tim SPIP	Oktober 2025
4	Struktur Organisasi telah disusun selaras dengan proses bisnis organisasi, namun belum sampai ke tingkat SOP.	Menyusun dan menetapkan SOP untuk seluruh proses bisnis utama	Kepala Subbag Perencanaan / Kepala Bidang	Januari 2026
5	Sudah ada pendelegasian wewenang dan tanggungjawab secara tepat, namun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.	Menyusun mekanisme monitoring dan evaluasi pendelegasian wewenang dan tanggung jawab secara berkala (setiap 6 bulan)	Sekretaris Dinas / Inspektorat Pembina	Desember 2025
6	Sudah terdapat penyusunan dan penerapan kebijakan pembinaan SDM, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.	Melakukan evaluasi efektivitas kebijakan pembinaan SDM dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan karier	Kepala Subbag Kepegawaian	November 2025

7	Tim SPIP telah terbentuk, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya	Meningkatkan kapasitas Tim SPIP melalui pelatihan, serta mengaktifkan agenda kerja rutin dan pelaporan berkala	Ketua Tim SPIP / Kepala Dinas	Oktober 2025
8	Sudah terjalin kerjasama yang baik dengan Instansi Terkait, namun masih perlu ditingkatkan lagi hubungan kerjasamanya.	Menyusun rencana kerja sama strategis tahunan dan melakukan evaluasi keberhasilan kemitraan antarinstansi	Kepala Dinas / Kepala Bidang	Desember 2025

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Tujuan kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan selaras dengan tujuan dalam RPJMD Kabupaten lamongan, dimana di dalam RPJMD Kabupaten Lamongan memiliki tujuan yaitu "**Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan**". Tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan. Sedangkan sasaran merupakan hasil yang hendak dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan.

Oleh karena itu guna mewujudkan visi dan misi sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pada Renstra Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2021-2026 maka ditetapkan tujuan jangka menengah yang hendak dicapai oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan, yang selaras dan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai oleh Kabupaten Lamongan yang dibagi menjadi 2 tujuan yaitu :

- 1. Meningkatnya Populasi Ternak dan;**
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Peternak**

B. Hasil Identifikasi Risiko

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai pelaksana tugas desentralisasi sektor Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi ke dalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan sebagai berikut :

Tabel Matriks Risiko Strategis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Populasi Ternak	Persentase peningkatan populasi ternak	Kematian ternak akibat penyakit dan kekurangan pakan	RSO.25.27.31.01	Kepala Dinas	Wabah penyakit, bibit unggul kurang, pakan terbatas	Eksternal & Internal	UC	Populasi turun, produksi terganggu
			Tingginya angka kesakitan ternak	RSO.25.27.31.02	Kepala Dinas	Kualitas pakan rendah, pemeliharaan belum optimal, layanan kesehatan hewan terbatas	Internal	C	Produksi ternak menurun, pendapatan peternak turun
2	Meningkatnya Pendapatan Peternak	Indeks yang Diterima Peternak (It)	Pendapatan peternak stagnan/menurun	RSO.25.27.31.03	Kepala Dinas	Harga jual rendah, biaya produksi tinggi, akses pasar terbatas	Eksternal	UC	Daya beli turun, usaha tidak berkelanjutan

Tabel Matrik Risiko Operasional Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Kegiatan	Jenis Risiko	Uraian Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sumber	C/UC	Penyebab	Dampak	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pelaksanaan	Operasional	Penggunaan sarana pertanian tidak sesuai petunjuk teknis	ROO.25.27.31.01	Kepala Bidang	Eksternal	C	Kurangnya pemahaman petani terhadap pedoman teknis	Efektivitas penggunaan sarana menurun sehingga memengaruhi hasil produksi ternak	Dinas, Masyarakat
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan, Tumbuhan, dan Mikroorganisme	Jumlah SDG Tersertifikasi	Perencanaan	Operasional	Data SDG tidak lengkap/terbaru sehingga perencanaan konservasi dan pemanfaatan tidak akurat	ROO.25.27.31.02	Kepala Bidang	Internal	C	Belum tersedia database SDG yang terpusat dan update tahunan	Ternak lokal terancam punah karena belum dikelola dengan baik.	Dinas, Peternak
3	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Jumlah Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pelaksanaan	Operasional	Obat ilegal/kadaluarsa beredar	ROO.25.27.31.03	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya inspeksi berkala	Bahaya bagi hewan dan manusia	Peternak, Konsumen
4	Pengendalian Benih/Bibit dan Hijauan Pakan	Jumlah Verifikasi Mutu Benih/Bibit dan Hijauan Pakan	Pelaksanaan	Operasional	Produk benih/bibit dan hijauan pakan tidak tersertifikasi	ROO.25.27.31.04	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya sosialisasi dan pelatihan sertifikasi bagi petugas dan produsen	Penurunan mutu genetik dan produktivitas ternak	Peternak, Dinas
5	Penyediaan Benih/Bibit dan Hijauan Antar Daerah	Jumlah Distribusi Benih/Bibit dan Hijauan	Pelaksanaan	Operasional	Mutu bibit/benih yang dikirim antar daerah tidak sesuai standar	ROO.25.27.31.05	Kepala Bidang	Eksternal	UC	Belum ada mekanisme kontrol mutu antar daerah pengirim dan penerima	Sebaran bibit berkualitas rendah dan tidak sesuai kebutuhan wilayah penerima	Peternak, Dinas
6	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Dibangun	Pelaksanaan	Operasional	Pekerjaan terlambat/tidak sesuai spesifikasi	ROO.25.27.31.06	Kepala Bidang	Eksternal	UC	Kinerja kontraktor rendah	Anggaran terbuang, manfaat tidak maksimal	Dinas, Masyarakat
7	Penjaminan Kesehatan Hewan (Penutupan/Pembukaan Wabah Penyakit Hewan)	Jumlah Penutupan/Pembukaan Wabah Penyakit Hewan	Pelaksanaan	Operasional	Hewan dan produk hewan masuk/keluar tanpa pemeriksaan saat status wabah	ROO.25.27.31.07	Kepala Bidang	Internal	C	Lemahnya pengawasan lintas instansi saat status wabah	Penyebaran penyakit lintas daerah, gangguan perdagangan ternak	Peternak, Dinas, Konsumen

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Tahap Kegiatan	Jenis Risiko	Uraian Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sumber	C/UC	Penyebab	Dampak	Pihak yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Pengawasan Pemasukan & Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Pemasukan & Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Pelaksanaan	Operasional	Hewan dan produk hewan masuk/keluar tanpa pemeriksaan kesehatan dan dokumen sah	ROO.25.27.31.08	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya koordinasi antarinstansi dan belum ada SOP pemeriksaan lintas daerah	Potensi penyebaran penyakit hewan menular lintas daerah dan turunya kepercayaan publik	Peternak, Dinas, Konsumen
9	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner	Pelaksanaan	Operasional	Kualitas layanan lab tidak memenuhi standar	ROO.25.27.31.09	Kepala Bidang	Internal	C	Sarpras lab belum optimal	Hasil diagnosis tidak akurat	Dinas, Peternak
10	Pembinaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)	Jumlah Pembinaan Pelaku Usaha ASUH	Pelaksanaan	Operasional	Pelaku usaha hasil ternak tidak menerapkan prinsip ASUH secara konsisten	ROO.25.27.31.10	Kepala Bidang	Internal	C	Tidak ada sistem pemantauan pasca pembinaan	Produk hewan berisiko tidak memenuhi standar ASUH dan menurunkan kepercayaan konsumen	Pelaku usaha, Dinas, Konsumen
11	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Pelaksanaan	Operasional	Praktik pemeliharaan tidak sesuai prinsip kesejahteraan	ROO.25.27.31.11	Kepala Bidang	Internal	C	Rendahnya pemahaman pelaku	Hewan stres, kualitas produk menurun	Peternak, Konsumen
12	Pengendalian & Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Penanggulangan Bencana Pertanian	Perencanaan	Operasional	Rencana kontinjensi bencana peternakan tidak tersedia atau belum diperbarui	ROO.25.27.31.12	Kepala Bidang	Internal	C	Belum ada kajian risiko dan koordinasi lintas bidang (Keswan, Budidaya, PPHP)	Keterlambatan respon bencana dan kerugian besar sektor peternakan	Peternak, Dinas, Masyarakat
13	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/kota	Pelaporan	Operasional	Izin tidak sesuai prosedur	ROO.25.27.31.13	Kepala Bidang	Internal	C	Intervensi/nepotisme	Konflik kepentingan & ketidakadilan	Dinas, Masyarakat
14	Perizinan Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Terbit	Pelaksanaan	Operasional	Izin usaha pengecer obat hewan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat	ROO.25.27.31.14	Kepala Bidang	Internal	C	Verifikasi lapangan belum dilakukan lintas bidang	Peredaran obat tidak sesuai standar dan menurunkan mutu pelayanan veteriner	Dinas, Pelaku Usaha, Konsumen
15	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan	Pelaksanaan	Operasional	Materi penyuluhan tidak tersampaikan secara luas kepada peternak	ROO.25.27.31.15	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya media penyebaran dan monitoring efektivitas	Praktik budidaya dan kesehatan ternak tidak optimal	Peternak, Dinas

C. Hasil Analisis Risiko

Berdasarkan pada matriks resiko strategis dan operasional di atas maka dapat dilakukan analisis terkait skala resiko yang akan dihadapi dalam Pembangunan sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Lamongan ke depan, adapun skala risiko serta penyebab dan dampak risiko dapat kami sajikan melalui tabel berikut :

Analisis Skala Risiko Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lamongan

Risiko Strategis

No	Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sebab Risiko	Sumber Risiko	C/UC	Dampak Risiko	Pihak Terkena	Analisis Risiko			Kategori Risiko
									Skala Dampak	Skala Kemungkin	Skala Risiko	
1	Kematian ternak akibat penyakit dan kekurangan pakan	RSO.25.27.31.01	Kepala Dinas	Wabah penyakit, bibit unggul kurang, pakan terbatas	Eksternal & Internal	UC	Populasi turun, produksi terganggu	Peternak, Konsumen, Dinas	4	3	12	Tinggi
	Tingginya angka kesakitan ternak	RSO.25.27.31.02	Kepala Dinas	Kualitas pakan rendah, pemeliharaan belum optimal, layanan kesehatan hewan terbatas	Internal	C	Produksi ternak menurun, pendapatan peternak turun	Peternak, Dinas	3	3	9	Tinggi
2	Pendapatan peternak stagnan/menurun	RSO.25.27.31.03	Kepala Dinas	Harga jual rendah, biaya produksi tinggi, akses pasar terbatas	Eksternal	UC	Daya beli turun, usaha tidak berkelanjutan	Peternak, Pemda	3	3	9	Tinggi

Risiko Operasional

No	Uraian Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sumber	C/UC	Penyebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Analisis Risiko			Kategori Risiko	Ket
									Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
1	Penggunaan sarana pertanian tidak sesuai petunjuk teknis	ROO.25.27.31.01	Kepala Bidang	Eksternal	C	Kurangnya pemahaman petani terhadap pedoman teknis	Efektivitas penggunaan sarana menurun sehingga memengaruhi hasil produksi ternak	Dinas, Masyarakat	2	2	4	Rendah	
2	Data SDG tidak lengkap/terbarui sehingga perencanaan konservasi dan pemanfaatan tidak akurat	ROO.25.27.31.02	Kepala Bidang	Internal	C	Belum tersedia database SDG yang terpusat dan update tahunan	Ternak lokal terancam punah karena belum dikelola dengan baik.	Dinas, Peternak	3	3	9	Tinggi	
3	Obat ilegal/kadaluarsa beredar	ROO.25.27.31.03	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya inspeksi berkala	Bahaya bagi hewan dan manusia	Peternak, Konsumen	3	3	9	Tinggi	
4	Produk benih/bibit dan hijauan pakan tidak tersertifikasi	ROO.25.27.31.04	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya sosialisasi dan pelatihan sertifikasi bagi petugas dan produsen	Penurunan mutu genetik dan produktivitas ternak	Peternak, Dinas	3	3	9	Tinggi	
5	Mutu bibit/benih yang dikirim antar daerah tidak sesuai standar	ROO.25.27.31.05	Kepala Bidang	Eksternal	UC	Belum ada mekanisme kontrol mutu antar daerah pengirim dan penerima	Sebaran bibit berkualitas rendah dan tidak sesuai kebutuhan wilayah penerima	Peternak, Dinas	3	3	9	Tinggi	
6	Pekerjaan terlambat/tidak sesuai spesifikasi	ROO.25.27.31.06	Kepala Bidang	Eksternal	UC	Kinerja kontraktor rendah	Anggaran terbuang, manfaat tidak maksimal	Dinas, Masyarakat	2	2	4	Rendah	
7	Hewan dan produk hewan masuk/keluar tanpa pemeriksaan saat status wabah	ROO.25.27.31.07	Kepala Bidang	Internal	C	Lemahnya pengawasan lintas instansi saat status wabah	Penyebaran penyakit lintas daerah, gangguan perdagangan ternak	Peternak, Dinas, Konsumen	3	3	9	Tinggi	

No	Uraian Risiko	Kode Risiko	Pemilik Risiko	Sumber	C/UC	Penyebab	Dampak	Pihak yang Terkena	Analisis Risiko			Kategori Risiko	Ket
									Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko		
8	Hewan dan produk hewan masuk/keluar tanpa pemeriksaan kesehatan dan dokumen sah	ROO.25.27.31.08	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya koordinasi antarinstansi dan belum ada SOP pemeriksaan lintas daerah	Potensi penyebaran penyakit hewan menular lintas daerah dan turunnya kepercayaan publik	Peternak, Dinas, Konsumen	3	3	9	Tinggi	
9	Kualitas layanan lab tidak memenuhi standar	ROO.25.27.31.09	Kepala Bidang	Internal	C	Sarpras lab belum optimal	Hasil diagnosis tidak akurat	Dinas, Peternak	2	2	4	Rendah	
10	Pelaku usaha hasil ternak tidak menerapkan prinsip ASUH secara konsisten	ROO.25.27.31.10	Kepala Bidang	Internal	C	Tidak ada sistem pemantauan pasca pembinaan	Produk hewan berisiko tidak memenuhi standar ASUH dan menurunkan kepercayaan konsumen	Pelaku usaha, Dinas, Konsumen	3	2	6	Sedang	
11	Praktik pemeliharaan tidak sesuai prinsip kesejahteraan	ROO.25.27.31.11	Kepala Bidang	Internal	C	Rendahnya pemahaman pelaku	Hewan stres, kualitas produk menurun	Peternak, Konsumen	2	2	4	Rendah	
12	Rencana kontinjenji bencana peternakan tidak tersedia atau belum diperbarui	ROO.25.27.31.12	Kepala Bidang	Internal	C	Belum ada kajian risiko dan koordinasi lintas bidang (Keswan, Budidaya, PPHP)	Keterlambatan respon bencana dan kerugian besar sektor peternakan	Peternak, Dinas, Masyarakat	3	3	9	Tinggi	
13	Izin tidak sesuai prosedur	ROO.25.27.31.13	Kepala Bidang	Internal	C	Intervensi/nepotisme	Konflik kepentingan & kefidakadilan	Dinas, Masyarakat	2	2	4	Rendah	
14	Izin usaha pengecer obat hewan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat	ROO.25.27.31.14	Kepala Bidang	Internal	C	Verifikasi lapangan belum dilakukan lintas bidang	Peredaran obat tidak sesuai standar dan menurunkan mutu pelayanan veteriner	Dinas, Pelaku Usaha, Konsumen	3	2	6	Sedang	
15	Materi penyuluhan tidak tersampaikan secara luas kepada peternak	ROO.25.27.31.15	Kepala Bidang	Internal	C	Kurangnya media penyebaran dan monitoring efektivitas	Praktik budidaya dan kesehatan ternak tidak optimal	Peternak, Dinas	2	3	6	Sedang	

D. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan, Cela Pengendalian, dan Rencana Tindak Pengendalian

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan, serta kegiatan pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko strategis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel sebagai berikut :

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan:

Risiko Strategis

No	Risiko	Kode Risiko	Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	RTP (Rencana Tindak Pengendalian)	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Kematian ternak akibat penyakit dan kekurangan pakan	RSO.25.27.31.01	Vaksinasi massal, pengawasan penyakit, edukasi pakan alternatif	Distribusi vaksin belum merata, teknologi pakan lokal belum optimal	Pemutakhiran jadwal vaksinasi, peningkatan penyuluhan biosekuriti, pelatihan produksi pakan fermentasi dari bahan lokal	Semester I Tahun 2025	
	Tingginya angka kesakitan ternak	RSO.25.27.31.02	Penyuluhan teknis dan kunjungan lapang	Rasio petugas lapang masih minim	Penambahan intensitas penyuluhan langsung di wilayah padat ternak, pembinaan teknis berkala melalui kelompok ternak	Semester II Tahun 2025	
2	Pendapatan peternak stagnan/menurun	RSO.25.27.31.03	Fasilitasi kemitraan dan promosi hasil ternak lokal	Akses pasar formal masih terbatas	Promosi produk peternakan melalui pameran/gelar pangan lokal dan mendorong kemitraan kelompok ternak dengan ritel lokal/UMKM pangan	Semester II Tahun 2025	

Risiko Operasional

No	Uraian Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Ket
1	Penggunaan sarana pertanian tidak sesuai petunjuk teknis	ROO.25.27.31.01						
2	Data SDG tidak lengkap/terbarui sehingga perencanaan konservasi dan pemanfaatan tidak akurat	ROO.25.27.31.02	Pendataan manual oleh petugas lapangan	Tidak ada sistem basis data digital dan SOP pemutakhiran data	Menyusun database SDG berbasis aplikasi dan memperbarui data setiap tahun	Kabid PPHP	Des-25	
3	Obat ilegal/kadaluarsa beredar	ROO.25.27.31.03	Inspeksi incidentil oleh petugas teknis	Tidak ada jadwal pengawasan rutin	Menetapkan jadwal pengawasan obat hewan minimal dua kali per tahun	Kabid Keswan	Jun-25	
4	Produk benih/bibit dan hijauan pakan tidak tersertifikasi	ROO.25.27.31.04	Pengawasan lapangan rutin oleh petugas	Tidak ada SOP verifikasi mutu yang baku	Menyusun SOP verifikasi mutu dan pelatihan sertifikasi bagi petugas lapangan	Kabid Budidaya	Jun-25	
5	Mutu bibit/benih yang dikirim antar daerah tidak sesuai standar	ROO.25.27.31.05	Koordinasi distribusi antar daerah	Belum ada pedoman mutu bersama	Menyusun pedoman mutu dan evaluasi kualitas tahunan antar daerah	Kabid Budidaya	Des-25	
6	Pekerjaan terlambat/tidak sesuai spesifikasi	ROO.25.27.31.06						
7	Hewan dan produk hewan masuk/keluar tanpa pemeriksaan saat status wabah	ROO.25.27.31.07	SOP tanggap darurat telah ada	SOP belum diimplementasikan lintas instansi	Simulasi tanggap darurat dan pembaruan SOP antar instansi	Kabid Keswan	Jun-25	

No	Uraian Risiko	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/Penangung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Ket
8	Hewan dan produk hewan masuk/keluar tanpa pemeriksaan kesehatan dan dokumen sah	ROO.25.27.31.08	Koordinasi pengawasan bersama Satpol PP dan Puskeswan	Belum ada SOP dan form baku pemeriksaan lintas daerah	Menyusun dan sosialisasi SOP/form baku lintas daerah serta pelatihan petugas pemeriksa	Kabid Keswan	Jun-25	
9	Kualitas layanan lab tidak memenuhi standar	ROO.25.27.31.09						
10	Pelaku usaha hasil ternak tidak menerapkan prinsip ASUH secara konsisten	ROO.25.27.31.10	Pembinaan rutin pelaku usaha ASUH	Belum ada sistem pemantauan pasca pembinaan	Menyusun sistem pemantauan berkala pelaku usaha hasil ternak	Kabid KESMAVET	Des-25	
11	Praktik pemeliharaan tidak sesuai prinsip kesejahteraan	ROO.25.27.31.11						
12	Rencana kontinjensi bencana peternakan tidak tersedia atau belum diperbarui	ROO.25.27.31.12	Pemantauan lapangan oleh penyuluh	Belum ada rencana kontinjensi tertulis dan simulasi	Menyusun rencana kontinjensi berbasis peta risiko dan simulasi tahunan	Kabid PPHP	Des-25	
13	Izin tidak sesuai prosedur	ROO.25.27.31.13						
14	Izin usaha pengecer obat hewan diberikan kepada pihak yang tidak memenuhi syarat	ROO.25.27.31.14	Pemeriksaan dokumen izin	Tidak ada koordinasi verifikasi lapangan	Inspeksi lapangan lintas bidang setiap 6 bulan	Kabid Keswan	Jun-25	
15	Materi penyuluhan tidak tersampaikan secara luas kepada peternak	ROO.25.27.31.15	Penyuluhan rutin tatap muka	Kurangnya variasi media penyuluhan	Pemanfaatan media daring, kelompok ternak, dan evaluasi efektivitas materi	Kabid PPHP	Des-25	

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kesuksesan Pengendalian risiko startegis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ke dalammatriks sebagai berikut :

Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun

Risiko Strategis

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemutakhiran jadwal vaksinasi, peningkatan penyuluhan biosecuriti, dan pelatihan produksi pakan fermentasi dari bahan lokal	Surat edaran, grup WhatsApp petugas lapangan, papan informasi, dan laporan kegiatan pelatihan	Bidang Keswan dan Kesmavet	Petugas lapang, peternak, camat, dan perangkat desa	Semester I Tahun 2025	Semester I Tahun 2026	Informasi disebarluaskan melalui koordinasi lintas bidang dan desa, termasuk pelaporan kegiatan ke pimpinan dinas.
2	Penambahan intensitas penyuluhan langsung di wilayah padat ternak serta pembinaan teknis berkala melalui kelompok ternak	Pertemuan kelompok ternak, laporan mingguan penyuluhan, dan platform pesan instan (WA Group Penyuluhan)	Bidang Budidaya	Peternak, kelompok ternak, dan petugas teknis kecamatan	Semester II Tahun 2025	Semester II Tahun 2025	Hasil penyuluhan dilaporkan secara berkala melalui aplikasi monitoring internal dan rapat evaluasi bulanan.
3	Promosi produk peternakan melalui pameran/gelar pangan lokal serta mendorong kemitraan kelompok ternak dengan ritel lokal/UMKM pangan	Media sosial resmi dinas, brosur, leaflet, publikasi website, dan laporan kegiatan pameran	Bidang PPHP	Peternak, pelaku UMKM, ritel lokal, dan masyarakat umum	Semester II Tahun 2025	Semester II Tahun 2025	Komunikasi dilakukan melalui forum kemitraan dan publikasi kegiatan di kanal informasi publik dinas.

Risiko Operasional

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-	-
2	Penyusunan dan pemutakhiran database SDG berbasis aplikasi	Aplikasi database SDG, laporan tahunan, surat tugas pemutakhiran data	Kabid Budidaya	Petugas pengelola SDG, penyuluhan, kepala bidang terkait	Des-25	Des-25	Komunikasi berbasis data digital untuk mempercepat koordinasi dan pelaporan konservasi SDG.
3	Penetapan jadwal pengawasan obat hewan dan pelaporan hasil inspeksi	Surat tugas, form laporan digital, papan pengumuman hasil pemeriksaan	Bidang Kesehatan Hewan	Petugas lapangan, pemilik toko obat hewan, dinas terkait	Jun-25	Jun-25	Hasil pengawasan disampaikan secara rutin melalui laporan elektronik dan rekap evaluasi semesteran.
4	Penyusunan SOP verifikasi mutu benih/bibit dan pelatihan petugas lapangan	Modul pelatihan, berita acara pelatihan, surat edaran SOP	Bidang Budidaya	Petugas verifikasi, produsen benih, dan kelompok ternak	Jun-25	Jun-25	Komunikasi antarpetugas dilakukan melalui forum teknis internal dinas dan pelaporan ke pimpinan.
5	Penyusunan pedoman mutu dan evaluasi kualitas antar daerah	Rapat koordinasi lintas kabupaten, notulensi, laporan evaluasi tahunan	Bidang Budidaya	Dinas penerima/pengirim benih, kelompok ternak, Balai Bibit	Des-25	Des-25	Informasi dibagikan melalui koordinasi resmi dan publikasi hasil evaluasi tahunan.
6	-	-	-	-	-	-	-
7	Simulasi tanggap darurat dan pembaruan SOP antar instansi	Surat undangan simulasi, laporan hasil simulasi, berita acara koordinasi	Bidang Kesehatan Hewan	Puskeswan, Satpol PP dan BPBD	Jun-25	Jun-25	Komunikasi lintas lembaga diatur melalui rapat koordinasi rutin dan simulasi bersama.
8	Penyusunan SOP dan form baku pemeriksaan lintas daerah serta pelatihan petugas	Dokumen SOP, form digital pemeriksaan, laporan pelatihan	Bidang Kesehatan Hewan	Petugas pemeriksa, Puskeswan	Jun-25	Jun-25	Informasi hasil pemeriksaan dilaporkan secara daring ke sistem administrasi dinas.
9	-	-	-	-	-	-	-
10	Penyusunan sistem pemantauan berkala pelaku usaha ASUH	Aplikasi pemantauan, laporan inspeksi, forum pembinaan pelaku usaha	Bidang Kesmavet	Pelaku usaha hasil ternak, petugas pengawas	Des-25	Des-25	Data dikomunikasikan secara daring dan dibahas dalam rapat koordinasi Kesmavet.
11	-	-	-	-	-	-	-
12	Penyusunan rencana kontinjensi dan simulasi penanggulangan bencana peternakan	Dokumen rencana kontinjensi, peta risiko, laporan simulasi	Bidang PPPB	Tim tanggap darurat, BPBD, penyuluhan	Des-25	Des-25	Informasi hasil simulasi dilaporkan ke pimpinan dinas dan disebarluaskan ke seluruh kecamatan.
13	-	-	-	-	-	-	-
14	Inspeksi lapangan lintas bidang setiap 6 bulan	Laporan inspeksi, foto kegiatan, notulensi hasil verifikasi	Bidang Keswan	Petugas lintas bidang, pelaku usaha	Jun-25	Jun-25	Komunikasi hasil inspeksi dilaporkan ke dinas dan direkam dalam sistem informasi perizinan.
15	Pemanfaatan media daring, kelompok ternak, dan evaluasi efektivitas materi penyuluhan	Media sosial, Zoom/WA Group penyuluhan, laporan evaluasi penyuluhan	Bidang PPPB	Peternak, penyuluhan, perangkat desa	Des-25	Des-25	Informasi hasil evaluasi digunakan untuk penyusunan materi penyuluhan berikutnya.

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas Pembangunan sektor Peternakan, guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel sebagaimana berikut :

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Risiko Strategis

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pemutakhiran jadwal vaksinasi, peningkatan penyuluhan biosecuriti, pelatihan produksi pakan fermentasi dari bahan lokal	Evaluasi capaian jadwal vaksinasi, laporan kegiatan penyuluhan dan pelatihan, verifikasi foto dan daftar hadir kegiatan	Kabid Budidaya dan Kabid Keswan	Semester I Tahun 2025	Semester I Tahun 2025	Monitoring dilakukan melalui laporan kegiatan lapang dan dokumentasi hasil pelatihan pakan fermentasi.
2	Penambahan intensitas penyuluhan langsung di wilayah padat ternak, pembinaan teknis berkala melalui kelompok ternak	Rekap laporan penyuluhan, observasi lapangan, dan umpan balik peternak penerima manfaat	Kabid Keswan	Semester II Tahun 2025	Semester II Tahun 2025	Pemantauan dilakukan bersamaan dengan kegiatan supervisi lapangan rutin oleh
3	Promosi produk peternakan melalui pameran/gelar pangan lokal dan kemitraan kelompok ternak dengan ritel lokal/UMKM pangan	Dokumentasi kegiatan promosi, laporan MoU kemitraan, serta evaluasi dampak peningkatan penjualan produk peternak	Kabid PPP	Semester II Tahun 2025	Semester II Tahun 2025	Monitoring dilakukan dengan mengukur peningkatan volume penjualan hasil ternak dan keberlanjutan kemitraan.

Risiko Operasional

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	-	-	-	-	-	-
2	Penyusunan dan pemutakhiran database SDG berbasis aplikasi	Review data tahunan dan audit data lapangan	Kabid Budidaya	Des-25	...	Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun
3	Penetapan jadwal pengawasan obat hewan dua kali per tahun	Laporan hasil inspeksi lapangan dan rekap pelanggaran	Kabid Keswan	Jun-25	Jun-25	Monitoring hasil tindak lanjut pelanggaran
4	Penyusunan SOP verifikasi mutu dan pelatihan petugas	Supervisi pelaksanaan verifikasi mutu oleh tim teknis	Kabid Budidaya	Jun-25	Jun-25	Disertai laporan evaluasi hasil sertifikasi
5	Penyusunan pedoman mutu distribusi antar daerah	Evaluasi kualitas bibit antar daerah setiap tahun	Kabid Budidaya	Des-25	...	Dilakukan bersama dinas penerima
6	-	-	-	-	-	-
7	Simulasi tanggap darurat dan pembaruan SOP lintas instansi	Simulasi dan rapat evaluasi lintas sektor	Kabid Keswan	Jun-25	Jul-25	Dilaksanakan sebelum musim rawan wabah
8	Penyusunan dan sosialisasi SOP/form pemeriksaan lintas daerah	Monitoring bersama Satpol PP dan Puskeswan	Kabid Keswan	Jun-25	Jul-25	Dievaluasi setiap semester
9	-	-	-	-	-	-
10	Penyusunan sistem pemantauan pelaku usaha ASUH	Review laporan pembinaan dan hasil uji sampel produk	Kabid Kesmavet	Des-25	...	Pemantauan dilakukan setiap triwulan
11	-	-	-	-	-	-
12	Penyusunan rencana kontinjensi berbasis peta risiko	Simulasi tahunan dan rapat koordinasi bencana	Kabid PPHP	Des-25	...	Hasil simulasi dilaporkan ke Kepala Dinas
13	-	-	-	-	-	-
14	Inspeksi lapangan lintas bidang setiap 6 bulan	Laporan hasil inspeksi dan rekomendasi tindak lanjut	Kabid Keswan	Jun-25	Jul-25	Dikoordinasikan dengan PPHP
15	Pemanfaatan media daring dan evaluasi efektivitas materi penyuluhan	Pemantauan interaksi daring, survei kepuasan peternak	Kabid PPHP	Des-25	...	Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan telah Menyusun dokumen dalam pengelolaan risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2025 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam Pembangunan sektor Peternakan di Kabupaten Lamongan.

